

Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Kenaikan Harga Beras

Lukman Arif, Putri Amalia Zahroh, Annisa Nur Firdaus, Nayani Alya Aquila
Muzdalifah, Ivan Prasetyo Nugroho

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id, 21041010196@student.upnjatim.ac.id,
21041010084@student.upnjatim.ac.id, 21041010181@student.upnjatim.ac.id,
21041010080@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of rising rice prices often occurs due to several influencing factors, one of which comes from the climate and the existence of a bumper harvest. In addition, higher market demand than production is also one of the causes. Surabaya as a city that is predicated as a consumer rather than a producer of rice is very careful in maintaining the existing rice supply. Public panic over the increase in rice prices has led the government to issue programs as a strategy to overcome it, one of which is consistently implemented to date is the Cheap Market Movement. The purpose of this research is to describe the government's strategy in overcoming the price of rice based on the five indicators of Geoff Mulgan's theory. This research uses descriptive qualitative research methods by taking results from interviews as primary data and secondary data obtained from literature reviews such as articles, journals, and relevant references. The results of this study reveal that the Cheap Market Movement program and the existence of SPHP rice can help people's lives and achieve the success rate of strategies issued by the Surabaya city government, especially by the Food Security and Agriculture Office.

Keywords: Strategy, Rice Price Increase, Cheap Market Movement, Surabaya City Food Security and Agriculture Office

ABSTRAK

Fenomena kenaikan harga beras yang sering terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya berasal dari iklim maupun adanya panen raya. Selain itu, permintaan pasar yang lebih tinggi daripada produksi juga salah satu penyebabnya. Kota Surabaya sebagai kota yang berpredikat sebagai konsumen bukan produksi beras ini sangat berhati-hati dalam menjadi pasokan beras yang ada. Kepanikan Masyarakat kepada kenaikan harga beras yang terjadi, membuat pemerintah mengeluarkan program sebagai strategi untuk mengatasinya salah satu yang konsisten dilaksanakan hingga saat ini adalah Gerakan Pasar Murah. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan strategi pemerintah dalam mengatasi harga beras yang berlandaskan lima indikator teori dari Geoff Mulgan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil hasil dari wawancara sebagai data primer dan data sekunder didapatkan dari tinjauan literatur seperti artikel, jurnal, dan acuan yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya program Gerakan Pasar Murah dan adanya beras SPHP ini dapat membantu kehidupan Masyarakat dan mencapai Tingkat keberhasilan strategi yang dikeluarkan pemerintah kota

Surabaya khususnya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kata Kunci : Strategi, Kenaikan Harga Beras, Gerakan Pasar Murah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa negara yang memiliki julukan negara agraris. Indonesia menjadi negara dengan julukan negara agraris karena jumlah produktivitas alamnya yang melimpah, beragam dan tanah yang subur. Hasil pertanian Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara dan dengan adanya hal tersebut stok pangan dalam negeri tercukupi (Setiawati et al., 2019). Sektor pertanian juga berperan baik di perekonomian negara. Menurut Budi Kalonjo dalam Kusumaningrum (2019), bahwa terdapat alasan pentingnya pertanian Indonesia yakni (1) Potensi Sumber daya yang beragam, (2) petak terhadap pendapatan nasional yang besar (3) besarnya penduduk (4) basis pertumbuhan di pedesaan.

Sektor pertanian yang dihasilkan di Indonesia adalah padi, kedelai, jagung, kacang tanah, teh, dan sebagainya. Padi merupakan hasil produksi yang sangat diprioritaskan karena karbohidrat utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil panen berdasarkan pada data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya luas panen padi yang diperkirakan seluas 10,20 juta hektar dengan banyaknya produksi padi sekitar 53,63 juta ton pada saat itu mengalami penurunan sebesar 255,79 ribu hektar atau 2,45 persen dibanding luas panen padi pada tahun 2022. Sehingga, tentunya berpengaruh pada jumlah panen beras di tahun 2023 menurun sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2022 (BPS Indonesia, 2023). Bapanas juga memperkirakan bahwa Indonesia dapat mengalami defisit persediaan beras sebanyak 2,8 juta ton (Newswire, 2024).

Menurunnya produksi padi juga disebabkan karena adanya badai el nino yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan produksi padi terkendala dan mengalami keterlambatan panen. Kemunduran waktu panen ini menyebabkan ketersediaan beras tidak dapat memenuhi permintaan pasar karena tingginya permintaan beras oleh masyarakat dengan ketersediaan beras yang semakin menurun. Permasalahan ini juga didukung oleh pernyataan Mangeswuri, (2023) terdapat tiga faktor penyebab kenaikan harga beras yang teridentifikasi. Pertama, adanya permasalahan iklim yang dapat menyebabkan melambungnya harga beras dalam negeri. Kedua, permasalahan dalam menurunnya luas lahan pertanian hingga permasalahan distribusi pupuk. Ketiga, permasalahan komponen produksi naik meliputi harga sewa lahan naik, harga pupuk naik, dan naiknya harga BBM (Mangeswuri, 2023). Kenaikan harga beras ini dapat berdampak pada kenaikan angka kemiskinan karena jumlah konsumsi beras masyarakat lebih besar dari jumlah produksi beras (Destiarsono & Darwanto, 2022).

Kenaikan harga beras dikhawatirkan dapat memicu inflasi dan memunculkan masalah sosial dikarenakan beras menjadi bahan pangan utama yang belum tergantikan. Di Surabaya, harga beras premium terus naik, pada awal tahun 2024

harga beras premium dikenakan harga Rp 13.000 per kilogramnya sedangkan pada saat ini mencapai harga Rp 18.000 (Harto & S, 2024). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPS) per tanggal 29 Februari 2024 harga beras kualitas medium dipatok Rp 15.700 – Rp 15.900 Per Kg, sedangkan beras dengan kualitas super dipatok harga Rp 16.700 – Rp 17.250 Per Kg nya. Lonjakan harga beras tersebut jauh di atas Harga Eceran Beras (HET) yang sebagaimana di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023 (Badan Pangan Nasional, 2023).

Tabel 1. Rata-rata Konsumsi per Kapita Bahan Makanan yang Mengandung Beras, 2019-2023

STATISTIK KONSUMSI PANGAN 2023

Tabel 1.1a. Rata-rata Konsumsi per Kapita Bahan Makanan yang Mengandung Beras, 2019 - 2023
Table Average per Capita Consumption of Foodstuff Containing Rice, 2019 - 2023

| No | Jenis Makanan / Food Items | Tahun / Year | | | | | Pertumbuhan/ Growth rate 2022 - 2023 (%) |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| B. Konsumsi setahun (Kg/kap/tahun) ¹⁾ Yearly Consumption (kg/cap/year) | | | | | | | |
| 1 | Beras / Rice | 78,429 | 78,487 | 81,518 | 81,044 | 80,905 | -0,17 |
| 2 | Beras Ketan / Glutinous Rice | 0,281 | 0,267 | 0,311 | 0,311 | 0,327 | 5,30 |
| 3 | Lainnya padi-padian / Other | 0,091 | 0,088 | 0,103 | 0,092 | 0,090 | -2,39 |
| 4 | Bubur bayi kemasan / Pomidge in package | 0,094 | 0,107 | 0,097 | 0,078 | 0,069 | -11,71 |
| 5 | Lainnya konsumsi lainnya / Others | - | 0,073 | 0,084 | 0,062 | 0,055 | -11,46 |
| 6 | Kue basah / Boil or steam cake | 0,946 | 0,926 | 0,857 | 0,804 | 0,854 | 6,20 |
| 7 | Nasi campur/frames / A plate of rice accompanied by a mixture of dishes | 10,546 | 10,185 | 7,931 | 7,495 | 7,904 | 5,45 |
| 8 | Nasi goreng/ Fried Rice | 1,297 | 1,230 | 1,061 | 1,159 | 1,182 | 1,93 |
| 9 | Nasi putih / Rice | 1,491 | 1,501 | 1,383 | 1,413 | 1,344 | -4,84 |
| 10 | Lontong/ketupat sayur / Rice steamed in a banana leaf or coconut leaf | 0,981 | 0,922 | 0,826 | 0,838 | 0,849 | 1,32 |
| 11 | Bubur Ayam/ | 0,249 | 0,235 | 0,211 | 0,213 | 0,213 | -0,16 |
| Jumlah / Total | | 94,473 | 94,020 | 94,382 | 93,509 | 93,791 | 0,30 |

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret, BPS
Source : National Survey of Socio Economics, First Quarter, BPS-Statistics Indonesia
Keterangan : *) diolah Pustatin -) Tidak terakap di dalam SUSENAS
Note *) processed by Pustatin -) Not Covered in SUSENAS

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pertanian, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,17%. Padahal pada tahun 2023, Indonesia mengalami krisis produksi beras baik beras produksi negara Indonesia maupun *import* dari luar yang menyebabkan harga beras melambung tinggi. Penurunan konsumsi beras juga terjadi pada konsumsi beras putih yang menurun hingga 4,84% dari tahun sebelumnya, artinya dari data tersebut dengan adanya penurunan ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah beras di Indonesia karena menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya stok beras di Indonesia menipis (langka) yang menyebabkan meningkatnya harga beras di masyarakat, sehingga masyarakat beralih ke beras bulog pemerintah yaitu SPHP (Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan) untuk masyarakat yang tidak mampu. Munculnya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan) ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga pangan ini.

Tabel 2. Data 10 Provinsi dengan Luas Panen Padi Terbesar Nasional Tahun 2022

10 Provinsi dengan Luas Panen Padi Terbesar Nasional (2022)

| No. | Nama Data | Nilai |
|-----|------------------|-----------|
| 1 | Jawa Timur | 1.693.210 |
| 2 | Jawa Tengah | 1.688.670 |
| 3 | Jawa Barat | 1.662.400 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 1.038.080 |
| 5 | Lampung | 518.260 |
| 6 | Sumatra Selatan | 513.380 |
| 7 | Sumatra Utara | 411.460 |
| 8 | Banten | 337.240 |
| 9 | Sumatra Barat | 271.880 |
| 10 | Aceh | 271.750 |

Sumber: BPS, 2023

Jawa Timur menduduki provinsi di Indonesia dengan kategori tingkat panen padi terbesar pada tahun 2022 dengan capaian 1,69 juta ha. Selanjutnya, disusul oleh Jawa Tengah dengan luas sebesar 1,68 juta ha dan di Jawa Barat sebesar 1.66 juta ha. Rekapitan BPS bahwasanya terdapat 12 provinsi mengalami peningkatan panen, sisanya mengalami penyusutan pada saat panen padi. Tetapi dapat kita ketahui bahwa Kota Surabaya merupakan kota terpadat kedua setelah Kota DKI Jakarta dengan minimnya lahan pertanian yang ada di Kota Surabaya.

Tabel 3. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Kota Surabaya Tahun 2020-2022

| Tahun | Luas Lahan (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 2020 | 1.865,64 | 59,70 | 11.138,05 |
| 2021 | 1.736,08 | 56,64 | 9.832,67 |
| 2022 | 1.455,52 | 56,20 | 8.180,52 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada tiga tahun terakhir, terjadi penurunan pada produksi padi di Kota Surabaya setiap tahunnya yang dapat menyebabkan meningkatnya harga beras di pasaran. Sebagai kota terpadat kedua setelah DKI Jakarta, masyarakat juga banyak mengeluhkan tingginya harga beras seperti yang dirasakan oleh pedagang beras Di pasar tradisional Dukuh Kupang Kota Surabaya sudah mengalami lonjakan harga beras awal tahun 2024 sampai sekarang. Menurut salah satu pedagang " Beberapa Permasalahan pada saat kenaikan ini sering terjadi, yakni pasokan beras premium 5 kilogram yang berkurang dan harganya juga semakin mahal" tutur Maimunah, Jumat (16/2/2024). Beras premium dijual dengan harga Rp 17.500 Per Kg, sebelumnya harga beras premium Rp 13.000 Per Kg. Sedangkan, harga beras medium sebelumnya kisaran Rp 11.000 Per Kg sekarang harga Per Kgnya sudah mencapai Rp 16.000

(Purnamasari, 2024). Kenaikan beras ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM, salah satunya penjual nasi di Pasar Blauran Kota Surabaya yang khawatir terhadap tingginya harga beras yang dirasakan akan membuat para pelanggan akan berkurang karena cukup membebani biaya produksi untuk makanan yang akan dijual oleh para pedagang (Devi, 2023).

Tabel 4. Data Produksi Padi Dan Beras Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2021

| Produksi Padi dan Beras Menurut Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020 - 2021* | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------|
| Kota/Municipality | Produksi Padi (ton) <i>Paddy Production (ton)</i> | | Produksi Beras (ton) <i>Rice Production (ton)</i> | |
| | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* |
| Kediri | 10 283,81 | 10 396,11 | 5 907,50 | 5 972,01 |
| Blitar | 5 274,24 | 5 888,25 | 3 029,77 | 3 382,49 |
| Malang | 11 723,75 | 12 215,73 | 6 734,67 | 7 017,26 |
| Probolinggo | 7 543,19 | 8 978,39 | 4 333,15 | 5 157,61 |
| Pasuruan | 10 115,21 | 8 614,04 | 5 810,65 | 4 948,31 |
| Mojokerto | 4 461,78 | 4 386,19 | 2 563,04 | 2 519,64 |
| Madiun | 15 166,53 | 13 416,04 | 8 712,35 | 7 706,79 |
| Surabaya | 11 138,05 | 10 206,22 | 6 398,20 | 5 862,92 |
| Batu | 4 988,40 | 5 216,21 | 2 865,57 | 2 996,44 |
| Jawa Timur | 9 944 538,26 | 9 908 931,80 | 5 712 597,01 | 5 692 143,07 |

Catatan/Note: Kualitas produksi gabah kering giling/*The production is in term of dry unhusked paddy*

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur, 2023

Data di atas yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur bahwa tercatat Kota Surabaya sebagai ibukota dari Jawa Timur mengalami penurunan produksi padi dari tahun 2020 – 2021 dengan jumlah selisih yang cukup signifikan sekitar 916,83 ton serta penurunan jumlah produksi berasnya dengan selisih sekitar 535,28 ton pada tahun 2020 -2021. Presentasi konsumsi beras dan permintaan pasar mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sebagai antisipasi dalam mengatasi kelangkaan pasokan beras di Indonesia. Badan pangan nasional (Bapanas) menetapkan kebijakan jangka pendek yaitu melakukan impor beras untuk dapat menstabilkan harga beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah yang gencar dilakukan serentak hingga saat ini adalah Gerakan pasar sebagai salah satu program efisiensi bagi masyarakat yang membutuhkan beras dengan murah dan berkualitas. murah yang sangat gencar dilakukan sebagai. Pemerintah menghimbau masyarakat Kota Surabaya tidak melakukan *panic buying* atau membeli beras dengan jumlah banyak dari yang dibutuhkan dan bijak dalam membeli beras. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk strategi pemerintah dalam menghadapi kebijakan kenaikan beras, khususnya pemerintah Kota Surabaya.

Dengan adanya isu ini yang setiap tahunnya kemungkinan terjadi, maka berdasarkan penelitian sebelumnya, oleh Dewi Restu Mangeswuri (2023) dengan judul penelitian “Tren Kenaikan Harga Beras dan Strategi Menurunkannya”. Pada penelitian ini membahas tentang penyebab kenaikan harga beras serta strategi dalam

menurunkannya. Penelitian terdahulu kedua yakni, Aryani (2021) dengan judul penelitian “Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan” bahwasanya peran pemerintah yang penting untuk mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga beras yang semakin tinggi. Sistem kontrol pada distribusi beras, pasokan dan harga beras harus tetap diawasi. Koordinasi pemerintah diharapkan berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. Pengertian strategi menurut Crown dalam (Felia, 2016) adalah ketepatan arah perusahaan untuk mengidentifikasi dalam sebuah perusahaan dalam memenangkan keuntungan persaingan pasar. Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan dalam buku *The Art of Public Strategy*, (2009) yang memuat Lima elemen, sebagai berikut: 1) *Purposes* (Tujuan) adalah alat untuk mengukur bagaimana keberhasilan program yang dikeluarkan pemerintah, 2) *Environments* (Lingkungan) adalah cara pemerintah untuk mengetahui apa saja dampak yang berpengaruh terhadap kenaikan harga beras, 3) *Directions* (Pengarahan) adalah alat untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan program, 4) *Actions* (Tindakan) adalah alat untuk pemerintah dalam menyampaikan program atau alternatif dalam menghadapi kenaikan harga beras, 5) *Learning* (Pembelajaran) digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi fenomena kenaikan harga beras yang kemungkinan terjadi pada ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan isu - isu yang sedang terjadi, yakni kenaikan harga beras yang signifikan sampai melebihi harga eceran tertinggi yang ada pada peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023. Maka dengan adanya isu tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kota Surabaya dalam menghadapi dampak kenaikan harga beras serta mengetahui dampak yang dialami oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi bawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif serta termasuk ke dalam penelitian kualitatif, alasan menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah sebagai bentuk upaya untuk memperoleh sebuah gambaran yang komprehensif serta mendalam terkait strategi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras dan dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga beras terhadap masyarakat kota Surabaya. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya. Penelitian kualitatif deskriptif dalam Hanyfah et al., (2022) bahwasanya penelitian kualitatif menjelaskan penelitian yang tanpa memanipulasi data biasanya dilakukan dengan wawancara.

Data yang digunakan data primer hasil dari wawancara dan data sekunder dari tinjauan literatur seperti artikel, jurnal, buku, acuan peraturan-peraturan yang relevan pada pembahasan penelitian ini atau yang relevan dengan pembahasan konflik kenaikan harga beras di Kota Surabaya. Selanjutnya, informan penelitian diperoleh melalui *purposive sampling* meliputi pegawai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dan ada beberapa elemen masyarakat yang

berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Surabaya.

Teknik pengambilan informasi pada penelitian ini berdasarkan konsep *snowball* untuk mempertimbangkan kemungkinan yang ada dan dihadapi dalam proses penelitian seperti data yang didapatkan belum memenuhi kapasitas. Penggunaan model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana 2014 sebagai acuan untuk analisis data. Tiga diantaranya yakni Data *Condensation* (kondensasi data), *Data Display* (tampilan atau sajian data), dan *Drawing and Verifying Conclusions* (menggambarkan dan memverifikasi penarikan kesimpulan).

Proses pengumpulan data dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga seluruh aspek tercakup, sehingga data yang diperoleh mencapai tahap jenuh. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan verifikasi pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan metode yang serupa. Teori pada penelitian ini adalah menggunakan teori strategi oleh Geoff Mulgan (2009) yang memuat Lima indikator, sebagai berikut: 1) *Purposes* (Tujuan), 2) *Environments* (Lingkungan), 3) *Directions* (Pengarahan), 4) *Actions* (Tindakan), 5) *Learning* (Pembelajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan, pada DKPP Kota Surabaya dan juga beberapa elemen masyarakat mengenai dampak kenaikan harga beras di Kota Surabaya berupa wawancara. Dengan fokus penelitian “Strategi Pemerintahan Kota Surabaya Dalam Menghadapi Kenaikan Harga Beras”. Berdasarkan teori strategi, menurut Geoff Mulgan (2009) yang memuat Lima indikator : 1) *Purposes* (Tujuan), 2) *Environments* (Lingkungan), 3) *Directions* (Pengarahan), 4) *Actions* (Tindakan), 5) *Learning* (Pembelajaran). Peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan dari wawancara maupun tinjauan literatur seperti artikel, jurnal, buku, acuan peraturan-peraturan yang relevan. Mengenai strategi yang dilakukan pemerintahan Kota Surabaya dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kota Surabaya sebagai berikut.

1. *Purposes* (Tujuan)

Tahapan pertama dalam menyusun dan menentukan strategi pemerintah dalam menangani suatu permasalahan di masyarakat adalah mengetahui tujuan dari strategi tersebut. Menurut KBBI, kata tujuan disini memiliki makna sebagai “arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan”. Sedangkan menurut Geoff Mulgan (2009), tujuan hadir melalui adanya kesenjangan diantara kebutuhan, aspirasi, dan ketakutan masyarakat dengan kenyataan yang ada pada saat ini.

Adanya tujuan dalam strategi pemerintah terhadap kenaikan harga beras ini adalah untuk menstabilkan harga beras di masyarakat agar masyarakat tetap dapat mengonsumsi beras dengan harga terjangkau dan tidak khawatir dengan menipisnya pasokan beras yang dapat menyebabkan harga beras meningkat. Strategi yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya ini dilakukan dalam mengendalikan kenaikan harga beberapa bahan pokok masyarakat di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) atau

HAPK (Harga Acuan Penjualan Konsumen). Terdapat beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dalam mengendalikan harga beras ini, diantaranya melakukan kegiatan *monitoring* harga komoditas pangan di pasar setiap hari dan menjalin kerja sama dengan daerah yang memproduksi bahan pangan khususnya berkoordinasi juga dengan bulog serta melakukan operasi pasar melalui program pemerintah yaitu (GPM) Gerakan Pasar Murah dengan menjual komoditas pangan dengan harga dibawah harga pasar dan menyalurkan beras SPHP (Pasar Surya Surabaya, 2024). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Pemerintah terus melakukan langkah-langkah menentukan strategi dalam menangani permasalahan masyarakat Kota Surabaya khususnya kenaikan harga beras di tengah-tengah masyarakat. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah ini tentunya telah dirasakan oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pendapat seorang penjual nasi yaitu pak Rasyid mengatakan bahwa “program-program yang diluncurkan oleh pemerintah ini cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari dan berjualan nasi” (Hasil wawancara Sabtu, 25 Juni 2024). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa strategi-strategi pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi kenaikan harga beras ini telah dirasakan oleh masyarakat.

2. *Environments* (Lingkungan)

Pada tahapan strategi ini, menurut Geoff Mulgan (2009) lingkungan memiliki peran dimana pemerintah ingin mencapai tujuan tersebut di saat ini dan juga masa depan dalam bertindak dan kapasitas yang dimiliki untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan mencapai tujuan. Pentingnya tahapan ini untuk dapat menentukan strategi apa yang dapat dilaksanakan dengan adanya kondisi lingkungan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab. Lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap individu.

Kenaikan harga beras di Kota Surabaya ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu penurunan luas lahan panen beras dan disebabkan juga karena adanya badai el nino yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan produksi padi terkendala dan mengalami keterlambatan panen. Kemunduran waktu panen ini menyebabkan ketersediaan beras tidak dapat memenuhi permintaan pasar karena tingginya permintaan beras oleh masyarakat dengan ketersediaan beras yang semakin menurun. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Mangeswuri (2023), terdapat tiga faktor penyebab kenaikan harga beras yang teridentifikasi. Pertama, adanya permasalahan iklim yang dapat menyebabkan melambungnya harga beras dalam negeri. Kedua, permasalahan dalam menurunnya luas lahan pertanian hingga permasalahan distribusi pupuk. Ketiga, permasalahan komponen produksi naik meliputi harga sewa lahan naik, harga pupuk naik, dan naiknya harga BBM. Kenaikan harga ini juga didukung oleh pernyataan bu Wilujeng selaku Tim Kerja Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa “kenaikan beras ini sudah ada alasannya yaitu juga

untuk dapat menyejahterakan para petani dengan adanya peningkatan pendapatan petani beras”.

Adanya hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengambil langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga beras ini melalui kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan dan berkoordinasi dengan bulog dalam menangani permasalahan tersebut. Menurut pernyataan salah satu masyarakat penjual sembako menyatakan bahwa “dengan adanya kenaikan harga beras ini mempengaruhi penjualan beras saya di toko yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat dan menurunnya omzet penjualan saya” (Hasil wawancara Rabu, 22 Mei 2024). Lingkungan dapat mempengaruhi pembuatan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya penjual sembako yang turut terkena dampak kenaikan harga beras.

3. *Directions* (Pengarahan)

Pengarahan merupakan instruksi yang diberikan oleh pemberi instruksi dalam meliputi koordinasi, komunikasi dan motivasi untuk melakukan perintah dari atasan (Wiyada et al., 2020). Kata pengarahan atau *direction* memiliki makna sebagai petunjuk ataupun pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Geoff Mulgan (2009), setelah selesai dengan tahapan tujuan dan lingkungan dilanjutkan dengan tahap arah (*directions*) terhadap langkah-langkah yang harus dituju. DKPP dan juga Pemerintahan Kota Surabaya telah mengambil beberapa langkah dalam mengendalikan kenaikan harga pangan terutama beras.

Langkah yang diambil diantaranya, melakukan *monitoring* terhadap harga pangan di pasar dan juga menjalin kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan (Pasar Surya Surabaya, 2024). Ibu Wilujeng selaku Ketua tim kerja Ketahanan Pangan (DKPP) Kota Surabaya menyampaikan mengenai kegiatan Gerakan Pangan Murah. GPM sendiri merupakan program untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bahan pokok dibawah harga pasar/ harga murah, dilakukan satu kali dalam sebulan yang berlokasi di daerah padat penduduk maupun rusun yang ada di Kota Surabaya. Dengan menjual bahan pangan di bawah harga pasar dan juga penyaluran beras SPHP ke kios-kios TPID yang terdapat di tiga belas pasar di Kota Surabaya, yang mana dijual kepada pedagang maupun konsumen dengan harga jual ke pedagang dibawah HET sedangkan konsumen sesuai dengan HET. Dengan adanya program GPM (Gerakan Pasar Murah) bisa membantu masyarakat dalam membeli bahan pangan terutama beras.

4. *Actions* (Tindakan)

Kehidupan yang dinamis merujuk pada segala sesuatu yang mempunyai pergerakan aktif dan berkembang. Keadaan yang mengalami berbagai fenomena dan beragamnya kondisi yang dialami. Dengan adanya kondisi tersebut memiliki konsekuensi yang diterima tersebut berbeda. Tindakan dapat didefinisikan sebagai tingkah laku oleh kelompok atau individu dengan berbagai jenis, baik Tindakan buruk atau Tindakan baik yang memiliki tujuan tertentu. tindakan juga memiliki

karakteristik dan konsekuensi yang berbeda-beda, seperti dengan adanya Tindakan pemerintah mengenai kebijakan yang seharusnya dikeluarkan untuk mengatasi problematika yang sedang terjadi serta Tindakan pemerintah dapat dimengerti sebagai Tindakan yang dilakukan dalam rangka melindungi dan memelihara kepentingan negara dan rakyat oleh yang berwenang (Hayati, 2021). Tindakan dalam kajian teleologi memberikan gambaran sebuah model sebagai perhitungan tentang keberhasilan suatu Keputusan yang mau dicapai oleh beberapa pihak dan sudut pandang yang dapat diterima setelah adanya Tindakan yang dilakukan yakni harapan sebagai hasil pendekatan teoritis (ekonomi, sosiologi, dan psikologi sosial) (Anwar, 2016).

Dalam hal ini, Tindakan pemerintah kota Surabaya terkait problematika tersebut yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun Pemerintahan Kota Surabaya terus mengeluarkan kebijakan seperti adanya program untuk mengatasi kegelisahan Masyarakat pada saat kenaikan harga beras tersebut sebagai strategi untuk mengatur Masyarakat agar tidak terlalu panik. Berikut adalah paparan dari Ibu Wilujeng sebagai Ketua Tim kerja ketahanan Pangan bahwasanya :

“...program yang dikeluarkan oleh dinas Ketahanan pangan dan pertanian dibawah pemerintahan kota Surabaya yakni GPM, yakni singkatan dari gerakan pasar Murah yang hingga saat ini di kota Surabaya tetap berjalan, penjajakan tempat yang menjadi titik lokasi GPM ini adalah tempat yang banyak orang berpenghasilan ekonomi menengah kebawah atau rusun-rusun yang ada di Surabaya, awal dulu dilaksanakan di rusun penjarangan, selain itu dari tim kami juga sering memantau pergerakan beras di kota Surabaya seperti adanya sidak pasar menjelang hari besar, dengan adanya sidak tersebut agar pengawasan HET beras tetap stabil dan sama-sama menguntungkan dari pihak petani dan warga”.

Selanjutnya, peneliti juga akan memberikan ulasan dari Masyarakat berprofesi pedagang sembako dan penjual nasi yang diambil peneliti sebagai responden dari adanya Tindakan pemerintah ini, sebagai berikut

“ ya cukup membantu program pemerintah ini, karena juga bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari juga pada saat berjualan, dan selain program pasar murah ini ada juga program BLT (bantuan langsung tunai)”.

Kelebihan dari Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan program yang dikeluarkan ini sangat membantu dan cukup konsisten dijalankan, namun kekurangan juga ada pada program pasar murah yang terletak pada produk beras yang dijual bermerek SPHP kurang diminati oleh beberapa Masyarakat dikarenakan tekstur Ketika sudah dimasak ini berbeda sehingga harus dicampur dengan beras merek lain agar hasil setelah dimasak ini lebih baik.

5. *Learning (Pembelajaran)*

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa proses seperti perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus dilalui oleh yang berwenang. Sejauh ini, pembelajaran yang dimaksud dalam kategori ranah kebijakan adalah evolusi pemerintah untuk menjadi yang lebih baik dalam mengatur pelaksanaan

kepentingan publik, yang melibatkan banyak aktor dan menunjukkan hasil akhir yang bervariasi (Yuka Asmara et al., 2020). Sehingga keterkaitan pembelajaran yang sudah dijelaskan secara singkat di atas dapat di relevankan dengan Arti pembelajaran dalam strategi pemerintah kota Surabaya dalam problem kenaikan harga beras yakni pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan kewaspadaan dan antisipasi yang lebih serius untuk menyeimbangkan fenomena kenaikan harga beras di masa yang akan datang dengan konsisten dalam menjalankan program yang ada di kota Surabaya yakni GPM (Gerakan pangan murah). DKPP Kota Surabaya mengajak beberapa dinas lainnya untuk beroperasi pada sidak pasar, DKPP ini menjalin Kerja sama dengan beberapa dinas di kota Surabaya, yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan. Kerja sama yang dijalin sebagai bentuk penguatan pemerintah kota Surabaya dalam memantau pasokan beras di kota Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwasanya fenomena yang terjadi pada awal tahun 2023 hingga 2024 ini sangat mengundang kepanikan banyak *stakeholder*, khususnya Masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sembako, penjual nasi serta Masyarakat berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah. Namun, peneliti juga membahas keterkaitan antara kegelisahan Masyarakat tersebut dengan program yang dikeluarkan pemerintah kota Surabaya yakni berupa strategi untuk mengatasinya. Dapat diketahui dan hasil dari wawancara antara peneliti dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bahwasanya dikarenakan harga beras yang tinggi tersebut, pemerintah mengeluarkan programnya sebagai alternatif menjawab kegelisahan Masyarakat tersebut sangat membantu, dikarenakan dalam program pemerintah berupa Gerakan Pasar Murah ini mempunyai patokan harga yang murah dibanding beras yang dijual bukan subsidi. Hanya saja kelemahan pada GPM tersebut kualitas beras yang tidak seperti biasanya atau kurang bagus (SPHP). Teori Geoff Mulgan yang digunakan dalam mengkaji pembahasan peneliti ini sangat relevan dengan situasi yang terjadi, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil dalam lingkup yang dibahas. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti ini yakni harapannya agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan atau referensi tambahan dan untuk penelitian selanjutnya agar membahas cakupan yang lebih luas dan jelas baik dari segi ruang lingkupnya, paparan fokusnya dan data yang didapatkan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2016). *Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas*. <http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/al-balagh>
- Aryani, D. (2021). Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. *Jurnal Pangan*, 30(2), 75–86.

- Badan Pangan Nasional. (2023). "Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras." <https://badanpangan.go.id/wiki/kebijakan>.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2021 dan 2022. Diambil kembali dari jatim.bps.go.id:https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/03/16/2521/luas-panen-produktivitas-dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2021-dan-2022.html
- Destiariono, M. E., & Darwanto. (2022). Dampak Produksi Beras terhadap Kemiskinan Moderat : Ardl Bounds-Testing Approach. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 6 (2), 1352-1361.
- Devi, A. (2023, september 13). *Keluhan Pedagang Makanan yang Labanya Makin Tipis gegara Beras Mahal*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6929524/keluhan-pedagang-makanan-yang-labanya-makin-tipis-gegara-beras-mahal>
- Farid, M., & Ishari, N. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. 7(1), 109–128.
- Felia, F. S. (2016). Analisa Strategi Bersaing PT. Surya Cipta Mandiri. *Agora*, 1-9. from radarsurabayabisnis.jawapos.com:https://radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2184170645/ini-keluhan-pedagang-beras-di-pasar-pasar-surabaya
- Gapari, M. Z. (2021). *Pengaruh kenaikan harga beras terhadap kesejahteraan petani di desa sukaraja*. 3(April), 14–26.
- Hanyfah, S., Ryan Fernandes, G., Budiarmo, I., & RayaiTengah Nomor, J. (2022). *Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data PELANGGAN PADA CAR WASH*.
- Harto, A. M., & S, A. B. (2024, Februari 13). *Kebutuhan Pokok*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/13/harga-beras-di-surabaya-terus-meroket-bersamaan-dengan-pemungutan-suara>
- Hayati, M. (2021). Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. In *Jurnal Transaksi* (Vol. 11, Issue 1).
- Mangeswuri, D. R. (2023). Tren Kenaikan Harga Beras dan Strategi Menurunkannya. *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis (DPR RI)*, Vol XV, No. 18, 16-20.
- Muhamad, N. (2023). *Daftar Provinsi dengan Luas Panen Padi Terbesar Nasional 2022*,

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4720 – 4732 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.3095

- Jawa Timur Memimpin. Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/04/daftar-provinsi-dengan-luas-panen-padi-terbesar-nasional-2022-jawa-timur-memimpin>
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Newswire. (2024). *BPS Ungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal Sampai Sekarang*. Diambil kembali dari ekonomi.bisnis.com:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240201/9/1737482/bps-ungkap-biang-kerok-harga-beras-masih-mahal-sampai-sekarang>
- Pasar Surya Surabaya. (2024). *Pemkot Surabaya Siapkan Berbagai Langkah Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok*. Retrieved from pasarsurya.surabaya.go.id:
<https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/2024/02/19/pemkot-surabaya-siapkan-berbagai-langkah-atasi-kenaikan-harga-bahan-pokok/>
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras Purnamasari, N. (2024, february 17). *Ini Keluhan Pedagang Beras di Pasar-Pasar Surabaya*. Retrieved
- Rocky, A. T., & Melkior, N. S. (2016). Strategi Pembangunan e-Culture di Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 1-8.
- Setiawati, T. W., Mardjo, M., & Mahita Paksi, T. F. (2019). Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art8>
- The Art of Public Strategy*. (2009). Oxford University Press Inc., New York.
- Widi, H. (2024). *Beras Picu Inflasi Selama Enam Bulan Berturut-turut*. Diambil kembali dari kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/01/beras-picu-inflasi-selama-enam-bulan-berturut-turut>
- Wiyada, R. A., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang
- Yuka Asmara, A., Nashihuddin, W., Wisnu Pradana, A., Dinaseviani, A., & Jayanthi, R. (n.d.). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Inovasi pelayanan Publik di China: suatu Pembelajaran bagi pemerintah dalam peningkatan Layanan Publik di Indonesia*. <https://doi.org/10.25077/jakp>